

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas tentang analisis data yang diperoleh melalui Wawancara langsung dengan informan masyarakat di Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Informan tersebut terdiri dari kalangan masyarakat biasa hingga ke penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut yaitu KPUD Kabupaten Musi Banyuasin.

Data yang akan disajikan adalah data berupa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti guna menganalisis dan menjawab permasalahan yang akan dibahas yaitu: *pertama*: permasalahan mengenai apa faktor-faktor penyebab tingginya angka Golput pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan yang *kedua*: permasalahan tentang bagaimana tanggapan KPUD Musi Banyuasin terhadap tingginya angka Golput yang terjadi pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 tersebut.

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Golput**

Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017, tingkat angka Golput pada masa itu cukup terbilang tinggi yaitu mencapai 41,05% dari keseluruhan daftar pemilih tetap (DPT)<sup>1</sup>. Atau dengan kata lain pasangan atau kandidat yang menang pada pilkada tersebut dikalahkan oleh angka Golput

---

<sup>1</sup> KPUD Kabupaten Musi Banyuasin (2016), *Op. Cit.*, h 5

Golput, adalah akronim dari golongan putih, istilah Golput ditujukan kepada mereka yang sengaja dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas untuk menolak memberikan suaranya dalam Pemilu. Maksud dan tujuan tersebut bisa saja berasal dari pengaruh pemikiran individu maupun dari pengaruh lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Albert Bandura yang mengatakan bahwa perilaku, person dan lingkungan bisa saling mempengaruhi.

Pada saat Pilkada tahun 2017 diselenggarakan, Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 14 Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Babat Supat, Babat Toman, Batang Hari Leko, Bayung lencir, Keluang, Lais, Lalan, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Sanga Desa, Sekayu, Sungai Keruh, Sungai Lilin, dan yang terakhir Tungkal Jaya<sup>2</sup>.

Dari ke-14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin tersebut, hanya 3 Kecamatan yang akan dijadikan tempat/lokasi pengumpulan data, yaitu di Kecamatan Bayung Lencir, Lais dan Sekayu, karena ketiga Kecamatan tersebut mempunyai tingkat angka Golput yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain.

Pada sub Bab ini akan membahas mengenai hasil wawancara serta analisis yang dilakukan peneliti terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Golput di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Bayung Lencir, Lais dan Sekayu. Berikut ini hasil wawancara peneliti dari ketiga Kecamatan tersebut.

---

<sup>2</sup> BPS Kabupaten Musi Banyuasin (2017), *Op. Cit.*, hlm 25.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dilapangan, ditemukan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin banyak yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Musi Banyuasin 2017, yakni Faktor Sosial-ekonomi, Faktor Rasional dan Faktor Psikologi.

### **1. Faktor Sosial-ekonomi**

Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan datang ke TPS untuk memilih. Sebagian besar berpendapat bahwa pergi ke TPS hanya untuk mencoblos tidak terlalu efektif. Mereka berpendapat bahwa pemilihan tidak akan merubah status sosial mereka sehingga pergi ke TPS hanya hal yang dianggap sepele bagi mereka. Faktor sosial ekonomi itu sendiri mencakup keadaan dari segi sosial, yakni pendidikan orang tersebut serta faktor ekonomi yakni masyarakat yang memiliki golongan mobilitas menengah keatas.

Adanya asumsi dari masyarakat yang mengatakan bahwa datang ke TPS untuk memilih hanyalah sebuah tindakan yang tidak produktif. Hal ini tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat yakni Nanang Budiarto yang ada di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

*“pada saat pemilihan berlangsung, saya tidak pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, karena saya tidak terlalu memperhatikan kegiatan mengenai politik. Kemudian antrian untuk memilih juga cukup lama. Lagi pula pemilihan kemarin juga tidak akan berdampak apa-apa terhadap kehidupan saya bila saya ikut memilih. Saya akan tetap seperti ini jadi seorang petani karet dan meyadap karet setiap harinya<sup>3</sup>.*

Hal ini termasuk pada segi perilaku yang terdapat pada teori Kognitif Albert Bandura. Karena pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih rendah cenderung golput dikarenakan mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan mereka dari pada datang ke TPS untuk memilih. Menurut mereka walaupun mereka sudah memilih tidak akan memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka.

Keadaan aktor politik yang berperan didalamnya seringkali tidak memenuhi keinginan masyarakat, serta menampilkan hal-hal yang membuat masyarakat lebih memilih untuk tidak mempergunakan hak pilihnya pada pemilihan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti melalui via telepon dengan Budi Ardiyanto masyarakat yang ada di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

*“saya pada pilkada yang lalu tidak ikut memilih, karena saya pribadi menilai bahwasanya saat ini sudah jarang ada aktor politik yang benar-benar bersih untuk melaksanakan tugasnya, dengan kata lain bahwa, siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nanti, mereka akan lebih memilih untuk mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan kami<sup>4</sup>.”*

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat ( seorang petani karet). Nanang budiarto yang dilakukan pada tgl 7 Agustus 2019 di Desa mangsang

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat (guru honor). Budi Ardiyanto yang dilakukan melalui via telpon pada tgl 2 September 2019 di Desa bayat ilir

Hasil wawancara diatas dapat dimasukkan ke dalam segi person yang terdapat dalam teori Kognitif Albert Bandura. Hal ini dapat dilihat dari jawaban wawancara diatas, dimana narasumber mengatakan bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi aktor-aktor politik yang bersih. Mungkin masih ada tapi tidak terlalu banyak. Apalagi sekarang orang-orang bisa dengan mudah untuk berkorupsi, orang-orang atas itu pasti lebih mengutamakan keperluan dan kepentingan mereka, kepentingan kita sebagai masyarakat pasti akan ditunda-tunda.

Jadi masyarakat ini memilih untuk Golput karena para pemimpin tidak sesuai dengan kriteria mereka, dan ini juga disebabkan karena kekecewaan mereka terhadap para pemimpin yang sebelumnya. Mereka menganggap belum ada orang yang mampu memimpin daerahnya dengan baik, para calon itu juga hanya memberikan janji-janji yang belum tentu dapat ditepati saat mereka telah terpilih.

Tidak hanya di Kecamatan Bayung Lencir saja, masyarakat yang tidak memilih karena dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi juga ditemukan pada masyarakat yang ada di Kecamatan sekayu. Dalam Kecamatan Sekayu sendiri, masyarakat yang melakukan tindakan golput memiliki tingkat pendidikan serta perekonomian yang rendah. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Yusuf Hidayat informan masyarakat dari Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sekayu yang mengatakan bahwa:

*“pada saat pilkada kemarin saya tidak ikut mencoblos. Karena menurut saya, kalau saya ikut mencoblos, adakah perubahan yang terjadi dengan kehidupan saya? Tentu tidak ada. Yang ada hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Kami yang hanya masyarakat tingkat bawah tidak akan terkena dampak dari pemilihan itu”.*<sup>5</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah, cenderung berpikir pesimis terhadap acara pilkada tersebut, mereka beranggapan bahwa acara pilkada itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap mereka yang berstatus sosial rendah.

Jawaban hasil wawancara dengan Yusuf Hidayat ini hampir sama dengan jawaban wawancara dengan Nanang Budiarto karena mereka sama-sama mengatakan percuma mereka mengikuti pemilihan Bupati di Muba tahun 2017, karena tidak akan merubah kehidupan mereka, tetapi hanya menguntungkan orang-orang mereka saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas, dapat diketahui bahwa yang berkaitan dengan teori Kognitif Albert Bandura hanya 2 faktor yaitu perilaku dan person. Berkaitan dengan perilaku karena masyarakat tidak mmeberikan hak suaranya karena mereka lebih mementingkan untuk bekerja. Sementara berkaitan dengan faktor person karena mereka merasa tidak ada calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria mereka atau mampu memimpin dengan baik.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang buruh karet). Yusuf hidayat yang dilakukan pada tgl 13 Agustus 2019 di desa rimba ukur

## 2. Faktor Rasional

Faktor rasional meliputi cara berpikir pemilih yang mempertimbangkan untung dan ruginya dia memilih. Sebelum mereka melakukan sesuatu yang akan dikerjakan, mereka cenderung akan mengkalkulasikan segala sesuatu tersebut berdasarkan pertimbangan apakah mereka akan mendapatkan keuntungan atau bahkan mendapatkan kerugian. Seperti mereka akan berfikir keuntunga apa yang akan saya dapatkan jika ikut berpartisipasi? Atau apa yang akan saya dapatkan ketika tidak ikut berpartisipasi?

Masyarakat dengan tipikal pemilih rasional akan selalu berhati-hati dalam menentukan pilihannya, sehingga tidak akan menutup kemungkinan mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi. sehingga mereka tidak akan terpengaruh terhadap aktifitas politik yang menurut mereka cenderung merugikan dan hanya membuang-buang waktu.

Hal ini dapat disesuaikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sofyandi informan masyarakat yang ada di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Bapak Sofyandi mengatakan:

*”saya tidak ikut memilih pada saat pemilihan itu berlangsung. karena melihat hasil dari pemilihan yang sebelum-sebelumnya, pada saat pemilihan berlangsung, para paslon tersebut banyak yang hanya mengumbar-ngumbar janji mereka yang tidak banyak mereka dapat wujudkan ketika telah menjabat sebagai bupati. Begitu pula pada pemilihan bupati sekarang, banyak yang memberikan janji-janji mereka yang saya tidak tahu apakah janji-janji tersebut akan mereka penuhi atau tidak. Jadi dari pada saya*

*mengulangi kesalahan saya seperti yang dulu, lebih baik saya tidak mengikuti pemilihan tersebut*<sup>6</sup>.

Pertimbangan dan pemikiran masyarakat terhadap paslon yang akan diberikan hak pilihnya, memiliki kriteria tertentu menurut masing-masing pemilih. Adapula pemilih yang sudah tidak mau lagi untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut, dikarenakan masyarakat berasumsi bahwa, kebanyakan dari paslon yang nantinya akan mereka pilih dan telah resmi sah menjadi kepala daerah mereka, para paslon tersebut tidak akan banyak mewujudkan janji-janji yang sudah mereka tawarkan pada saat berkampanye kepada masyarakat sekitar.

Hal ini termasuk dalam segi faktor person dalam teori Kognitif Albert Bandura dimana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Bayung Lencir menyebutkan bahwa masyarakat cenderung ragu untuk memberikan hak suaranya kepada para paslon, karena masyarakat takut apabila sistem kinerja dari paslon yang akan terpilih memiliki sistem kinerja yang sama seperti kepala daerah yang telah terpilih sebelum-sebelumnya yang tidak melaksanakan tugasnya secara merata.

Bukan hanya membicarakan tentang sistem kinerja para paslon, masyarakat yang ada di Kecamatan Bayung Lencir sendiri juga ada yang membicarakan mengenai paslon-paslon yang menyalonkan diri pada pilkada Musi Banyuasin tahun 2017. Dimana masyarakat di Kelurahan Mekar Jaya ada yang mengatakan bahwa paslon pada pilkada tersebut kurang menarik.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat ( seorang karyawan swasta). Sofyandi yang dilakukan pada tgl 7 Agustus 2019 di Desa mekar jaya.

Hal tersebut dapat kita lihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Aji Santoso informan masyarakat yang ada di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

*“saya bukannya dengan sengaja untuk tidak memberikan hak suara saya pada saat itu. Karena pada pilkada itu kan hanya ada dua calon pasangan yang menyalonkan diri untuk menduduki kursi bupati, dan diantara dua calon tersebut yang saya kenal hanya paslon dari nomor urut satu yaitu bapak Dodi Reza Alex Noerdin. Itupun saya mengenal beliau karena beliau adalah anak dari bupati kami yang sebelumnya yakni bapak Alex Noerdin, dan tidak menutup kemungkinan bahwa beliau menginginkan posisi sebagai Bupati Musi Banyuasin semata-mata hanya untuk meneruskan atau mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sedangkan untuk paslon nomor urut dua yakni bapak Amiri Aripin, saya tidak terlalu megenal sosok beliau. Alasan itulah yang membuat saya untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah tersebut”<sup>7</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat pemilih yang tidak memilih sudah memiliki standarisasi tersendiri untuk menentukan calon yang diinginkan ataupun beberapa kriteria visi dan misi yang kira-kira dapat menguntungkan masyarakat disekitarnya terlebih lagi untuk dirinya sendiri.

Masyarakat yang tidak memilih telah memiliki kriteria tersendiri untuk calon yang diinginkan yang dianggap mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar terkhusus keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan masyarakat yang ada di Desa Rimba Ukur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

*”pada pemilihan bupati kemarin saya sengaja tidak memilih. Karena saya pribadi berpikir, pada saat itu calon-calon yang*

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat (pegawai swasta). Aji santoso yang dilakukan pada tgl 7 Agustus 2019 di Desa mekar jaya

*mengusungkan diri untuk dipilih tidak ada yang masuk dalam kriteria saya. Yang satu saya tidak terlalu mengenalnya, dan calon yang satunya lagi mungkin dia mencalonkan diri sebagai bupati hanya untuk meneruskan jejak ayahnya sebagai bupati. Jadi dari pada memilih, lebih baik saya bekerja mencari uang”.*<sup>8</sup>

Dalam hasil wawancara terlihat ketidaksediaan dalam diri informan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan hak suaranya dalam pilkada tersebut. hal ini dikarenakan para calon yang mengusungkan diri pada masa itu tidak memiliki kriteria yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh informan tersebut.

Masyarakat dengan tipikal pemilih rasional akan selalu berhati-hati dalam memberikan suaranya terhadap calon yang dipilihnya. Tidak menutup kemungkinan mereka akan memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut apabila mereka tidak menemukan kriteria yang ada pada masing-masing calon dengan kriteria yang diinginkan. Pernyataan ini dapat disamakan dengan hasil wawancara dengan informan masyarakat yang ada di Desa Sungai Batang, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin

*“sebetulnya saya sangat suka dalam acara pilkada-pilkada seperti ini. Dan pada saat pilkada yang sebelum-sebelumnya saya selalu ikut berpartisipasi untuk mencoblos. Tapi pada saat pilkada yang kemarin saya tidak ikut berpartisipasi. Karena menurut saya pada pilkada kemarin, para calon yang mengusungkan diri tidak ada yang memenuhi standar dari ciri-ciri yang saya mau. Nomor urut satu calonnya bapak Dodi, entah mengapa saya tidak begitu tertarik pada figur calon ini, karena menurut saya visi dan misi beliau tidak begitu memikat hati saya, tidak seperti saat ayahnya yang menyalonkan diri jadi bupati, pada saat itu jujur saya tertarik terhadap sosok ayahnya dengan visi dan misinya, dan memilih bapaknya beliau (bapak Alex Noerdien), tetapi saat anaknya yang*

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat. Siti halimah yang dilakukan pada tgl 13 Agustus 2019 di desa rimba ukur, Kecamatan Sekayu

*menyalonkan diri saya kurang tertarik, sedangkan untuk calon yang nomor urut dua saya tidak terlalu mengenal beliau”.*<sup>9</sup>

Masyarakat yang tidak memilih karena faktor rasional mayoritas dari kalangan yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka lebih memilih untuk tidak memilih karena mereka telah memiliki pemikiran tersendiri yang mendalam terhadap para calon. Masyarakat juga sudah memiliki sikap politik tertentu sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan keempat narasumber tersebut, jika dikaitkan dengan Teori Kognitif Albert Bandura, maka jawaban dari keempat narasumber tersebut termasuk dalam faktor person. Karena jawaban narasumber tersebut lebih banyak mengarah pada kekecewaan mereka terhadap para Paslon, dan ketidaktertarikan masyarakat akan visi dan misi yang disampaikan oleh para Paslon tersebut.

### **3. Faktor Psikologi**

Faktor psikologi pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Dari kelompok pertama dijelaskan bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian seseorang yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya.

Sedangkan penjelasan yang kedua lebih menitikberatkan ke faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku nonvoting

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang guru). Namusir yang dilakukan pada tgl 13 Agustus 2019 di desa sungai batang, Kecamatan Sekayu

disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, dan alienasi.

Perilaku pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya atas dasar faktor psikologi sesungguhnya bukan tanpa alasan yang mendasar. Masyarakat merasa bahwa pada saat berkampanye, semua paslon berusaha untuk mendekati mereka dengan segala cara yang ada. Namun pada saat sudah menduduki jabatan mereka lebih mementingkan dirinya dan orang-orang tertentu.

Hal ini dapat disandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan masyarakat yang ada di Desa Epil, Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

*“Pada pemilihan kemarin saya tidak ikut memilih, karena bagi saya siapapun yang nantinya menjadi bupati, sistem kerjanya akan sama seperti bupati-bupati yang telah terpilih sebelumnya, yang sistem kerjanya tidak terlalu terlihat hasilnya untuk kami. Pada saat mereka telah terpilih menjadi bupati, kebanyakan dari mereka hanya akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan orang-orang tertentu saja<sup>10</sup>”.*

Sistem kinerja pemerintah sendiri sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih itu sendiri. Hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor psikologis masyarakat. Pada tahap ini, golput yang terjadi dikarenakan faktor psikologi termasuk dalam golput golongan ideologis yang telah dikemukakan oleh Indra J Piliang<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat (seorang pedagang). Apri wibowo yang dilakukan pada tgl 9 Agustus 2019 di desa epil.

<sup>11</sup> Efriza, *Op.Cit.*, Hlm. 11

Hal ini sangat sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan. Dalam hasil wawancara terlihat masyarakat merasa enggan untuk memberikan hak suaranya pada pilkada tersebut, dikarenakan pada diri masyarakat tersebut telah dipengaruhi oleh sistem kinerja pemerintah setempat yang dianggap kurang merata dalam menjalankan tugasnya.

Masyarakat sudah merasa lelah dengan segala janji-janji yang diberikan oleh para calon. Karena ketika para calon telah menduduki jabatannya, mereka tidak banyak yang menunaikan janji-janji yang telah mereka berikan ke masyarakat. Beberapa masyarakat yang golput sepertinya telah memiliki rasa kekecewaan tersendiri didalam dirinya, sehingga mereka memutuskan untuk tidak memilih di pemilihan selanjutnya.

Ada pula masyarakat yang memang tidak memilih dikarenakan mereka telah mengetahui tingkat kekuatan serta ketenaran yang dimiliki oleh masing-masing calon pada saat itu. Sehingga masyarakat cenderung apatis dan lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut.

Hal ini ditemukan pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan masyarakat yang ada di Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin

*“pada saat itu saya tidak memilih, karena apa artinya satu suara yang saya miliki. Lagi pula saya memilih atau tidak, yang pasti menang si calon nomor urut satu bapak Dodi Reza. Kita lihat saja perbandingan diantara kedua paslon tersebut, pak Dodi namanya sudah sangat tenar di telinga kami, karena yang kita tahu bahwasanya beliau itu adalah anak dari bupati kami yang*

*sebelumnya yaitu pak Alex. Dan juga nomor urut satu di usung oleh banyak partai politik. Sedangkan paslon nomor urut dua pak amiri sendiri, kami belum terlalu mengenal beliau, dan juga beliau mencalonkan diri melalui jalur independen. Dari situ kita sudah bisa menilai perbandingan kekuatan serta ketenaran masing-masing paslon, dan bisa ditebak dengan jelas siapa yang akan memenangkan jabatan sebagai bupati. Jadi ikut atau tidaknya saya dalam pilkada tersebut, yang pasti menang ya bapak Dodi itu”<sup>12</sup>.*

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwasanya perbandingan antara ketenaran serta kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing paslon dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau tidaknya dalam proses pemilihan tersebut. Hal ini semakin diperkuat kebenarannya dengan ditemukannya data hasil wawancara dengan informan masyarakat yang ada di Desa Teluk, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin.

*“bagi saya kurang pas bila dua paslon ini di adu untuk menjadi bupati. Karena menurut saya pribadi, di antara kedua paslon tersebut tidak memiliki keseimbangan antara ketenaran maupun kekuatannya”<sup>13</sup>.*

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik di diri masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga menimbulkan adanya perasaan bahwa aktivitas politik tidak menghasilkan kepuasan atau hasil yang dapat dirasakan secara langsung.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan dengan informan masyarakat ( seorang pedagang). Syamsul arifin yang dilakukan pada tgl 9 Agustus2019 di desa epil

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan dengan informan masyarakat Totok ardiansyah. Yang dilakukan pada tgl 9 Agustus 2019 didesa teluk

Disisi lain masyarakat merasa jenuh karena terlalu sering diadakan acara-acara pemilu dengan jarak waktu yang tidak terlalu jauh. Hal ini merupakan salah satu penyebab masyarakat menjadi apatis terhadap aktivitas politik sehingga mereka merasa jenuh dan tidak ingin datang ke TPS guna memberikan hak suaranya. Hal ini sama seperti yang disampaikan melalui via telpon oleh informan masyarakat yang ada di Desa Epil, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin.

*“Jujur saya ikut berpartisipasi untuk memilih pada pemilihan bupati kemarin, tetapi saya tahu bahwa masyarakat disini banyak yang tidak memberikan suaranya untuk memilih. Alasan mereka tidak memilih dikarenakan mereka itu merasa jenuh dengan terlalu seringnya diadakan acar-acara pemilu seperti ini. Sehingga masyarakat merasa malas datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dan juga siapapun yang akan terpilih pada pemilihan bupati kemarin, tidak ada dampak apa-apa yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat disini”.*<sup>14</sup>

Data hasil temuan dilapangan diketahui bahwa masyarakat merasa jenuh dengan terlalu sering diadakan kegiatan pemilu, sehingga masyarakat merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Kejenuhan serta kebosanan itulah yang merupakan salah satu penyebab masyarakat malas untuk datang ke TPS guna memberikan hak pilihnya.

Faktor psikologi sendiri merupakan faktor yang mempunyai dua kategori. Kategori yang pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang, yakni perilaku tidak memilih disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman dan sebagainya. Sedangkan kategori yang kedua yakni faktor yang berkaitan dengan orientasi

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat. Adi wardana yang dilakukan melalui via telpon pada tgl 2 September 2019 di desa epil

kepribadian, yakni perilaku tidak memilih disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis (masa bodoh), anomie (tidak ada arah) dan alienasi (perasaan keterasingan).

Pernyataan kategori yang pertama sesuai dengan hasil wawancara peneliti melalui via telepon dengan informan masyarakat yang ada di Kelurahan Kayu Are, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

*“ya, pada saat pilkada tahun 2017 kemarin saya tidak ikut mencoblos, karena waktu itu ada timses dari salah satu calon yang datang kerumah untuk meminta dukungan suara. Ya namanya aja perumahan komplek yang penghuninya masih suka ngerumpi, ada berita sekecil apapun pasti cepat nyebarnya ke penduduk sekitar, jadi dari pada saya di fitnah, lebih baik saya tidak ikut mencoblos, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi”<sup>15</sup>*

Informan ini memilih golput dikarenakan menurutnya dengan adanya kedekatan dengan salah satu timses calon, dapat membahayakan situasi sosialnya. Hal ini senada dengan pernyataan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Hasil wawancara peneliti dengan faktor psikologi apabila dikaitkan dengan faktor yang ada dalam Teori Kognitif Albert Bandura, maka termasuk kedalam faktor person dan faktor lingkungan. Termasuk faktor person karena jawaban narasumber lagi-lagi mengatakan bahwa masyarakat tidak mengenal sosok calon bupati mereka.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan informan masyarakat. Agus budiman yang dilakukan melalui via telepon pada tgl 2 September 2019 di kelurahan kayu are

Hasil wawancara ini termasuk kedalam faktor lingkungan karena masyarakat mengatakan ada orang-orang pendukung suatu Paslon yang datang kerumah meminta dukungan, tetapi dia takut mendapat fitnah dari tempat lingkungan rumahnya sehingga dia tidak mengikuti pemilihan bupati tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tingginya angka golput pada pemilihan kepala daerah (bupati) Musi banyuasin tahun 2017. Terjadi kebingungan dalam masyarakat yang berdampak cukup negatif pada partisipasinya di pemilihan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin mengenai perihal faktor penyebab tingginya angka golput pada pilkada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga faktor yang menyebabkan angka golput di tiga kecamatan itu tinggi, faktor tersebut adalah faktor sosial-ekonomi, faktor psikologi dan yang terakhir faktor rasional.

Faktor sosial-ekonomi merupakan faktor yang mengemukakan alasan mengapa masyarakat yang lebih berpendidikan cenderung golput. Hal ini juga sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Indra J Piliang sebagai Golput Politis. Faktor yang kedua, yakni faktor psikologi dimana faktor ini mengemukakan alasan atas segala bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam bentuk golput. Hal ini serupa dengan apa yang telah dikemukakan oleh Indra J Piliang sebagai

golput Ideologis. Dan faktor yang terakhir adalah faktor rasional, yakni faktor yang memperhitungkan untung dan ruginya jika hendak pergi ke TPS untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Hal ini juga serupa dengan yang dikemukakan oleh Indra J Piliang yang menyebutkan bahwa golput ini seperti golput Pragmatis<sup>16</sup>.

Dari ketiga faktor tersebut, di temukan ada satu kecamatan yang masyarakatnya melakukan tindakan golput yang mana tindakan tersebut disebabkan oleh faktor psikologi yaitu di Kecamatan Lais. Masyarakat yang ada di Kecamatan Lais sendiri banyak yang mengeluh atas sistem kinerja pemerintah yang dianggap kurang merata dalam memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat.

**Tabel. 3.1**  
**Faktor Penyebab Tingginya Golput di Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Tahun 2017**

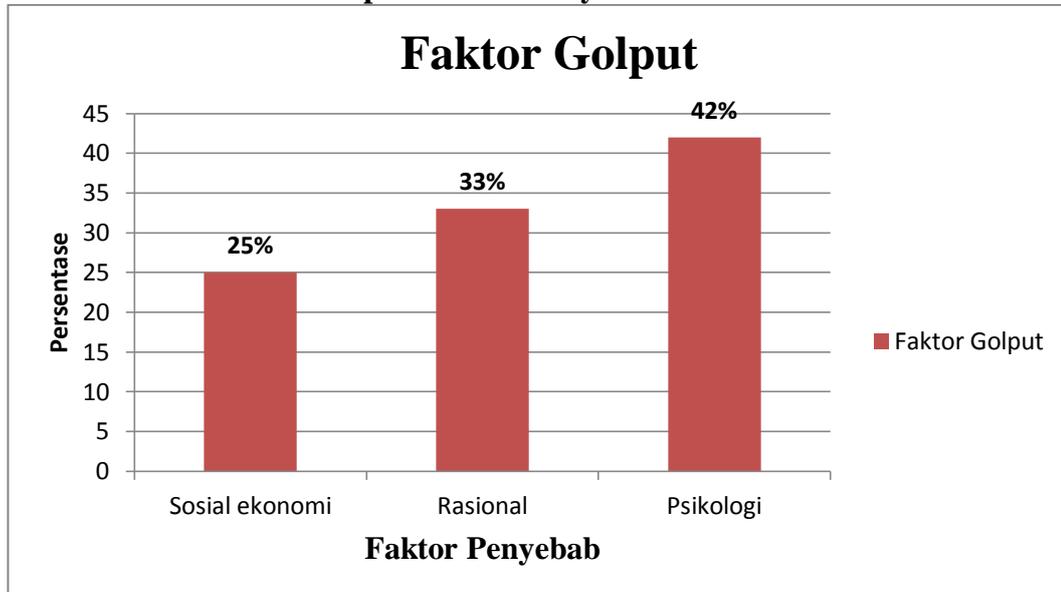
No	Jumlah Informan	Presentase (%)	Faktor Penyebab Golput
1.	3	25%	Sosial Ekonomi
2.	4	33%	Rasional
3.	5	42%	Psikologi

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa faktor penyebab Golput yang paling tinggi adalah faktor Psikologi dengan 5 orang informan. Sedangkan yang paling sedikit adalah faktor sosial ekonomi dengan jumlah informan hanya 3 orang. Sementara itu total dari informan dari ketiga faktor itu adalah sebanyak 12 orang informan.

---

<sup>16</sup> Efriza, *Op.Cit.*, Hlm 11

**Gambar 3.1**  
**Diagram Persentase Faktor Penyebab Tingginya Golput di**  
**Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017**



Dari hasil persentase diagram batang diatas dapat dilihat bahwa masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin banyak yang tidak mengikuti proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 kemarin banyak didominasi oleh faktor Psikologi dengan persentase yang berjumlah 42%.

#### **B. Tanggapan Pihak KPUD Terhadap Tingginya Angka Golput Pada Pilkada di Tahun 2017**

Setelah peneliti memaparkan dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka Golput pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017, selanjutnya peneliti membahas tentang bagaimana respon atau tanggapan dari pihak penyelenggara pilkada tersebut yakni pihak KPUD Musi Banyuasin terhadap tingginya angka Golput di Pilkada Musi Banyuasin Tahun 2017 berdasarkan faktor yang sudah dijelaskan.

Dalam hal ini peneliti memaparkan serta menjelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pihak KPUD Musi Banyuasin mengenai bagaimana tanggapan pihak KPUD Kabupaten Musi Banyuasin mengenai tingginya angka Golput pada Pilkada tahun 2017. Pada kesempatan ini, peneliti telah berhasil mewawancarai tiga (3) informan dari pihak KPUD Musi Banyuasin yang pada saat Pilkada tersebut mereka mempunyai tanggung jawab untuk membuat pemilihan itu dapat berjalan dengan lancar.

Perilaku Golput yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terbilang memperhatikan. Dimana dengan jumlah Golput yang mencapai 41,05% dari total keseluruhan DPT menunjukkan bahwa tingkat kesadaran serta kepedulian masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terbilang sangat minim terhadap acara pemilihan.

Hal ini tentu saja membuat para pihak penyelenggara Pilkada tersebut yakni KPUD Musi Banyuasin merasa kecewa terhadap tindakan Golput yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Rasa kekecewaan tersebut ditemukan peneliti saat berhasil mewawancarai informan dari pihak KPUD Musi Banyuasin yakni ibu Maryani yang menjabat sebagai devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, partisipasi Masyarakat dan SDM, beliau mengatakan:

*“Kami selaku pihak penyelenggara pada Pilkada masa itu merasa kecewa terhadap tingginya angka golput tersebut. pada saat pilkada tahun 2017 kemarin, yang kami lakukan tidak hanya untuk mempersiapkan secara maksimal kebutuhann-kebutuhan yang diperlukan pada pilkada tersebut, tetapi kami juga semaksimal mungkin ikut turun kemasayarakat guna melakukan sosialisasi,*

*yang bertujuan supaya masyarakat dapat mengikuti proses pemilihan tersebut. akan tetapi ya masyarakat masih banyak yang tidak mengikuti proses pemilihan tersebut, dan kami tidak bisa menyalahkan masyarakat karena tidak memberikan hak pilihnya, karena itu sudah menjadi hak untuk masyarakat itu sendiri mau atau tidaknya mereka dalam memberikan suaranya”.*<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pihak KPUD Musi Banyuasin merasa sangat kecewa atas apa yang terjadi pada Pilkada tahun 2017 kemarin. Dari apa yang telah dipersiapkan oleh pihak KPUD Musi Banyuasin bisa dibilang sudah sangat maksimal dalam mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, guna memperlancar proses jalannya pemilihan selama pilkada tahun 2017 itu berlangsung.

Selain mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pilkada tersebut, pihak KPUD Musi Banyuasin juga mengatakan bahwa mereka juga turut memaksimalkan diri untuk ikut turun lebih dekat ke masyarakat guna memberikan sosialisasi, dengan tujuan agar masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan Pilkada tersebut mau berbondong-bondong datang ke TPS guna memberikan hak suaranya.

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi realita dilapangan, bahwasanya pihak KPUD Musi Banyuasin memang benar-benar telah melakukan sosialisasi secara personal dengan masyarakat, dengan tujuan untuk mengajak masyarakat agar tidak golput pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan informan dari pihak KPUD Musi Banyuasin. Ibu Maryani selaku devisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih, partisipasi Masyarakat dan SDM yang dilakukan pada tgl 15 Agustus 2019

Usaha pihak penyelenggara Pilkada yakni KPUD Musi Banyuasin dalam memaksimalkan kinerjanya untuk meminimalisir angka Golput pada saat itu memang sudah terbilang cukup baik. Namun pada kenyataannya masyarakat yang namanya sudah terdaftar di DPT pada Pilkada tahun 2017 kemarin masih banyak yang tidak memberikan hak suaranya. Hal tersebut memiliki beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk datang ke TPS, salah satu alasannya ialah faktor paslon yang di anggap kurang menarik.

Pada dasarnya, para kandidat yang mencalonkan diri juga memiliki pengaruh dalam menentukan tinggi dan rendahnya angka partisipan dari masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan informan dari pihak KPUD Musi Banyuasin yakni dengan Bapak Khoirul Anam. Beliau mempunyai jabatan di KPUD Musi Banyuasin di Devisi Teknis Penyelenggaraan. Beliau mengatakan bahwa:

*“Melihat dari jumlah angka golput pada masa itu menurut sungguh memperhatikan. Dimana jumlah golput pada saat itu hampir mencapai setengah dari jumlah keseluruhan DPT. Melihat peristiwa ini saya beserta pihak-pihak KPU yang lain tertarik untuk mengadakan yang namanya observasi secara diam-diam ke Kecamatan yang terlibat pada Pilkada di tahun 2017 kemarin untuk mencari tau, apa yang menjadi alasan masyarakat tidak memberikan hak pilihnya? Dan dari hasil observasi kami kemarin ditemukanlah beberapa alasan yang membuat masyarakat banyak yang tidak memberikan hak suaranya. akan tetapi dari sekian banyak alasan yang kami temukan, ada satu alasan dari masyarakat yang menarik, yakni dari paslonnya sendiri. Masyarakat banyak yang mengatakan bahwa pada saat Pilkada tahun 2017 kemarin, kedua paslon yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan sebagai bupati kurang seimbang antara power dengan keeksistensianya. Dan ini menimbulkan sebuah asumsi pada diri masyarakat bahwa memilih atau tidaknya mereka, pasti*

*yang akan memenangkan jabatan tersebut ialah paslon nomor urut satu, yaitu Pak Dodi dan Pak Beni”.*<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah satu Pihak KPUD Musi Banyuasin dapat disimpulkan bahwasanya keseimbangan antara kekuatan serta ketenaran seorang paslon dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Apabila kekuatan dan ketenaran yang dimiliki oleh masing-masing calon kandidat tidak berimbang, maka bisa menimbulkan sebuah asumsi yang dapat menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk memberikan hak suara yang dimilikinya.

Hal ini juga sama dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan masyarakat yang ada di Kecamatan Lais, dimana masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang Golput karena faktor Psikologi<sup>19</sup>. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa perbandingan antara ketenaran serta kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing paslon dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau tidaknya dalam proses pemilihan tersebut.

Berbicara tentang kekuatan serta ketenaran dari masing-masing paslon pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 tentu dapat terlihat perbedaannya. Dari paslon nomor urut satu sendiri yakni Bapak Dodi Reza dan Bapak Beni Harnedi merupakan elit politik yang namanya sudah simpang siur terdengar di kalangan masyarakat. Bahkan pada saat Pilkada tersebut berlangsung, paslon nomor urut satu sendiri memiliki sebelas partai pengusung. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan informan dari pihak KPUD Musi Banyuasin. Khoirul Anam selaku Devisi Teknis Penyelenggaraan yang dilakukan pada tanggal 2 September 2019

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan salah satu informan masyarakat di Kecamatan Lais. Syamsul Arifin, *Op.Cit.*, Hlm.60

paslon nomor urut dua yakni Bapak Amiri Aripin dan Ahmad Toha mencalonkan diri melalui jalur independen atau perorangan. Bahkan pada saat pilkada tersebut berlangsung, banyak masyarakat calon pemilih yang belum terlalu mengenal sosok beliau.

Hal tersebut menjadi salah satu dasar yang menyebabkan masyarakat banyak yang berasumsi bahwa ikut atau tidaknya mereka pada pemilihan tersebut tidak akan merubah situasi bahwa yang akan memenangkan pemilihan tersebut yaitu paslon nomor urut satu sehingga kebanyakan dari masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, ada juga beberapa alasan yang menyebutkan bahwa pada saat Pilkada tersebut berlangsung, banyak dari kalangan masyarakat yang merasa jenuh dengan terlalu seringnya diadakan acara pemilihan seperti ini. Kejenuhan ini juga menjadi faktor masyarakat malas untuk datang ke TPS. Hal ini serupa dengan apa yang di katakan oleh pihak KPUD Musi Banyuasin yakni Bapak Yupizer selaku Devisi Hukum dan Pengawasan yang berhasil peneliti wawancarai, dimana Pihak KPUD ini mengatakan bahwa:

*"Apabila melihat tingginya angka Golput dari hasil pemilihan kepala daerah kemarin, saya pribadi selaku pihak penyelenggara acara merasa kecewa dan prihatin dengan hasil tersebut, tetapi kami juga tidak bisa memksakan kehendak kami untuk menuntut masyarakat agar mau memberikan hak pilihnya, karena itu sudah menjadi hak mereka untuk mau atau tidaknya memberikan hak pilihnya. Tapi disini kami juga sudah mengetahui faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak memberikan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah kemarin. Salah satu faktornya yaitu adanya kejenuhan di diri masyarakat karena terlalu seringnya diadakan acara-acara pemilu. Dari kejenuhn itulah yang pada*

*akhirnya membuat masyarakat menjadi malas untuk datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya”<sup>20</sup>.*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan salah satu pihak penyelenggara acara Pilkada tersebut yakni pihak KPUD Musi Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa terdapat rasa kekecewaan pada pihak KPUD atas tingginya angka Golput pada Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 kemarin. Tingginya angka Golput itu sendiri disebabkan oleh adanya kejenuhan pada diri masyarakat yang terlibat dalam pilkada masa itu.

Hal ini juga serupa dengan data yang ditemukan peneliti ketika mewawancarai salah satu informan masyarakat yang ada di Kecamatan Lais. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Lais merasa jenuh dengan terlalu sering diadakannya kegiatan pemilu, sehingga masyarakat merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan-kegiatan yang semacam itu<sup>21</sup>.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak KPUD Musi Banyuasin tentang bagaimana tanggapan dari pihak KPUD Musi Banyuasin mengenai tingginya angka Golput tersebut, telah ditemukan data-data yang dapat disimpulkan bahwa, adanya rasa ketidakpuasan pada Pihak penyelenggara yakni KPUD Musi Banyuasin dalam menyikapi tingginya angka Golput yang terjadi pada Pilkada tahun 2017 kemarin, karena hasil tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak KPUD Musi Banyuasin yang telah melaksanakan tugasnya untuk menyiapkan segala

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan informan dari pihak KPUD Musi Banyuasin. Yupizer selaku Devisi Hukum dan Pengawasan yang dilakukan pada tanggal 2 September 2019

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan salah satu informan masyarakat di Kecamatan Lais melalui via telpon. Adi wardana, *Op.Cit., Hlm.61*

perlengkapan yang diperlukan dalam Pilkada tersebut, serta memaksimalkan diri dalam mensosialisasikan ke masyarakat untuk ikut mencoblos pada saat Pilkada tersebut berlangsung.

Dari hasil wawancara tersebut, pihak KPUD Musi Banyuasin juga menyebutkan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari masyarakat yang terlibat dalam pilkada tersebut lebih memilih untuk tidak memberikan hak pilihnya. Alasan tersebut mulai dari adanya asumsi bahwa masyarakat banyak yang tidak terlalu tertarik pada paslon-paslon yang mencalonkan diri pada Pilkada tersebut karena dianggap kedua paslon pada Pilkada itu dinilai tidak seimbang baik dari kekuatan maupun ketenarannya. Dan juga adanya rasa kejenuhan pada diri masyarakat karena terlalu sering diadakannya acara pemilihan seperti ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam menanggapi tingginya angka Golput pada pemilihan Bupati Musi Banyuasin tahun 2017 pihak KPUD Musi Banyuasin menyebutkan tiga tanggapan dalam menanggapi tingginya angka Golput yang terjadi pada masa itu. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada saat itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak KPUD, karena melihat jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam Pilkada tersebut masih tinggi. Kedua, pihak KPUD Musi Banyuasin juga mengatakan bahwa tingginya jumlah masyarakat yang tidak berpartisipasi Pada proses pemilihan Bupati tersebut dikarenakan faktor paslonnya sendiri, yang dalam hal ini terlihat perbandingannya antara kekuatan serta ketenaran pada masing-masing paslon, karena kekuatan serta ketenaran

pada masing-masing paslon juga ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Ketiga, pihak KPUD Musi Banyuasin juga mengatakan bahwa adanya kejenuhan pada masyarakat karena terlalu sering diadakannya peroses pemilihan umum.